



LAPORAN PELAKSANAAN

PROGRAM KEGIATAN

PEMBENTUKAN PARIWISATA
PEDESAAN RAMAH ANAK BEBAS
DARI KEKERASAN DAN EKSPLOITASI

KERJASAMA :

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN ECPAT INDONESIA

2023

LIST OF CONTENT

DAFTAR ISI



-  **Gambaran Umum.**
-  **Pelaksanaan Kegiatan.**
-  **Hambatan, Tantangan dan Peluang.
Rekomendasi.**
-  **Pelatihan Pembentukan
Pariwisata Pedesaan Ramah Anak
di Kabupaten Bogor.**
-  **Pelatihan Pembentukan
Pariwisata Pedesaan Ramah Anak
di Kabupaten Toba.**

GAMBARAN UMUM

Program Pariwisata Pedesaan Ramah Anak terbebas dari Kekerasan dan Eksploitasi adalah program yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bekerja sama dengan ECPAT Indonesia. Program ini dilatar belakangi oleh kerjasama KemenPPPA dengan ECPAT Indonesia di tahun 2016 untuk melakukan asesmen tentang kerentanan anak mengalami eksploitasi seksual di daerah wisata di 7 daerah tujuan wisata, yaitu Pulau Seribu (DKI Jakarta), Karang Asem (Bali), Gunung Kidul (Yogyakarta), Garut (Jawa Barat), Bukit Tinggi (Sumatera Barat), Toba Samosir dan Teluk Dalam (Sumatera Utara) yang menyatakan bahwa benar anak rentan mengalami eksploitasi seksual di daerah wisata.

Sebagai solusi pencegahan, KemenPPPA dengan ECPAT Indonesia di tahun 2017 kemudian melakukan program pelatihan kepada Dinas PPPA, Dinas Pariwisata, Pokdarwis, Pengusaha Wisata dan juga Tour Guide, namun sejak tahun 2018 berdasarkan refleksi dan evaluasi pelaksanaan program, maka terdapat pergeseran strategi program pencegahan, dimana jika pada program sebelumnya penerima manfaatnya adalah Pemerintah dan stakeholder wisata di tingkat kabupaten, kemudian di geser kepada penerima manfaat di akar rumput, yaitu Pemerintah dan stakeholder desa. Dasar argumentasi dari perubahan strategi adalah, kelompok masyarakat di tingkat Desa adalah unsur terdekat dengan kehidupan dan lingkungan tumbuh kembang anak-anak.

Sehingga pada tahun 2018 penulisan buku panduan pariwisata pedesaan ramah anak mulai disusun, dengan mengkoneksikan dengan program Desa Wisata yang digagas oleh Kementerian Pariwisata dan Kementerian Desa, maka program pencegahan eksploitasi seksual anak ini dipandang sebagai langkah sangat strategis untuk mengembangkan industri pariwisata dan melindungi anak-anak ditingkat komunitas.

Harapannya selain membawa keuntungan finansial industri pariwisata juga perlu diantisipasi dengan kewaspadaan terhadap perlindungan anak. Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Indonesia tidak terelakkan juga membawa budaya dan kebiasaan dari negaranya, bahkan ditemukan wisatawan menggunakan pariwisata sebagai tempat untuk melakukan aksi kejahatan termasuk melakukan eksploitasi seksual anak.

Pembentukan Pariwisata Pedesaan Ramah Anak Bebas dari Kekerasan dan Eksploitasi yang dilaksanakan pertama kali di tahun 2021, dengan melatih 2 Desa yaitu Desa Kuta Mandalika di kabupaten Lombok Tengah dan Kampung Derawan di kabupaten Berau. Sehingga sejak tahun 2021-2022 terdapat 8 Desa yang telah dilatih untuk menjadi Desa Wisata Ramah Anak.

Ditahun 2023, KemenPPPA dan ECPAT Indonesia kembali bekerjasama untuk menyelenggarakan pelatihan untuk membentuk Desa Wisata Ramah Anak. Berdasarkan pertimbangan data kerentanan, maka ditentukan 2 wilayah kabupaten yang masing-masing kabupaten terdiri dari 3 Desa Wisata yang akan mendapatkan intervensi, yaitu Kabupaten Bogor dan juga Kabupaten Toba. Selain program pelatihan ditahun 2023 juga dilakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap program yang telah berjalan selama 2 tahun yaitu pada 4 Desa di kabupaten Manggarai Barat dan satu desa di Kuta Mandalika kabupaten Lombok tengah.



PELAKSANAAN KEGIATAN

— Monitoring dan Evaluasi

Latar Belakang

Monitoring dan Evaluasi (Monev) merupakan dua kegiatan terpadu dalam rangka pengendalian suatu program. Meskipun merupakan satu kesatuan kegiatan, Monitoring dan Evaluasi memiliki fokus yang berbeda satu sama lain. Dimana jika mengacu pada pengertiannya monitoring dimaknai sebagai sebuah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program, memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran. Monitoring melibatkan perhitungan atas apa yang kita lakukan, monitoring melibatkan pengamatan atas kualitas dari layanan yang kita berikan. Sedangkan evaluasi artinya sebuah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan secara sistematis menginvestigasi efektifitas program. Menilai kontribusi program terhadap perubahan (Goal/objektif) dan menilai kebutuhan perbaikan, kelanjutan atau perluasan program (rekomendasi).

Program Pembentukan Pariwisata Pedesaan Ramah Anak bebas dari Kekerasan dan Eksploitasi mulai dijalankan tahun 2021, ditahun 2023 telah masuk dalam Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di Kementerian Bappenas, sehingga memasuki tahun ketiga yaitu tahun 2023 muncul kebutuhan dilakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap program yang telah dijalankan, dari 8 Desa yang berada di Kabupaten Berau, Manggarai Barat, Lombok Tengah, Magelang dipilih 2 Kabupaten yang menjadi sasaran Monev yaitu Lombok Tengah, NTB dan Manggarai Barat NTT.

Dasar pemikiran memilih 2 daerah kabupaten tersebut adalah karena di Manggarai Barat pada saat pelaksanaan pelatihan pembentukan pariwisata pedesaan ramah anak bebas dari kekerasan dan eksploitasi di tahun 2022 ditemukan adanya praktek prostitusi anak yang diduga beririsan dengan tindak pidana perdagangan anak untuk tujuan seksual, sementara itu pemilihan Desa Kuta Mandalika kabupaten Lombok Tengah karena ditemukan banyaknya praktek eksploitasi ekonomi anak-anak untuk berjualan souvenir disekitaran pantai Kuta Mandalika dan Pantai Tanjung Aan dan lokasi sirkuit Motor GP. Alasan lainnya adalah karena kedua daerah kabupaten tersebut saat ini menjadi primadona kunjungan wisatawan baik dari wisatawan domestic maupun wisatawan mancanegara.



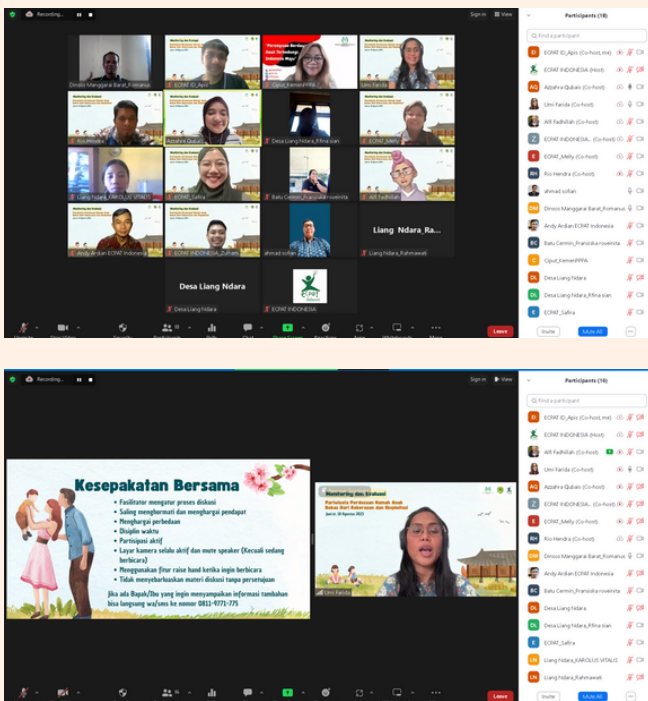
PELAKSANAAN KEGIATAN

— Monitoring dan Evaluasi

Gambaran Pelaksanaan

Monitoring dan Evaluasi program pembentukan pariwisata pedesaan ramah anak terbebas dari kekerasan dan eksploitasi dilaksanakan pada bulan Agustus di 2 kabupaten, yaitu:

1. Manggarai Barat



Pelaksanaan Monev di 4 Desa di Manggarai Barat dilakukan secara online melalui zoom meeting pada tanggal 18 -23 Agustus 2023, dimana kegiatan Focus Group discussion (FGD) dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2023, dari 4 Desa yang diintervensi terdapat 3 Desa, yaitu Desa Batu cermin dan Desa Loha serta Desa Liang Ndara yang hadir mengikuti FGD. Adapun peserta yang hadir terdiri dari Tokoh Masyarakat, pemerintah Desa, PKK atau kelompok perempuan, Pokdarwis. Sementara itu wawancara dilakukan pada perwakilan stakeholder Desa, Dinas Pariwisata, Dinas PPPA dan Perwakilan Organisasi Sosial Masyarakat (NGO).

2. Lombok Tengah



Pelaksanaan Monev dilakukan secara tatap muka baik itu FGD maupun Wawancara dengan stakeholder terkait. Dimana FGD dilakukan di Hotel Raja di Kuta Mandalika pada tanggal 25 Agustus 2023 dengan dihadiri oleh perwakilan PATBM, Forum Anak, BPD, Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, tokoh Adat, PKK, perwakilan pengusaha homestay, Pokdarwis, dari Desa Kuta Mandalika dan organisasi Perlindungan Anak Gagah, Dinas PPPA di Kabupaten Lombok tengah. Sementara itu wawancara dilakukan selama 2 hari yaitu dari tanggal 24-25 Agustus 2023 pada perwakilan Dinas Pariwisata, Dinas PPPA, Dinas PMD, Dinas Sosial, Masyarakat yaitu tour guide dari Desa Sade/Rumbitan, Anak dan perempuan penjual asongan di pantai Kuta Mandalika

PELAKSANAAN KEGIATAN

— Monitoring dan Evaluasi

Temuan Penting

- Pentingnya dukungan dari pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan program ini;
- Pentingnya adanya Kerjasama lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Dinas untuk bekerja bersama-sama saling bergandengan tangan mengimplementasikan program ini;
- Penting pelibatan organisasi masyarakat sipil misalnya organisasi perlindungan anak di tingkat kabupaten untuk membantu dan mendorong pemerintah Desa mengimplementasikan program ini;
- Dana Desa hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur belum ada penganggaran khusus untuk perlindungan anak di desa;
- Perlu adanya sinkronisasi program yang ada di tingkat nasional dengan program yang ada di tingkat desa;
- Perlu adanya evaluasi metode program perlindungan anak yang dilaksanakan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) perlu untuk memberikan otoritas penuh kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal dalam melaksanakan program perlindungan anak agar kebutuhannya sesuai dengan konteks yang ada di wilayah;
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan kementerian lainnya yang terkait perlu memfasilitasi ruang dialog bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendiskusikan mengenai prioritas upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan perlindungan anak;
- Penyelarasan koordinasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk pemberian otoritas dalam pengoptimalan program perlindungan anak di daerah ; dan
- Baik pemerintah pusat maupun daerah perlu untuk mendorong inovasi dalam pengembangan produknya dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak.

PELAKSANAAN KEGIATAN

— Monitoring dan Evaluasi

Temuan KEK Kuta Mandalika

1. Penting melakukan pelatihan untuk usaha wisata dan perjalanan;
2. Meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam menegakkan kasus seputar perlindungan anak;
3. Perlu adanya fasilitasi peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka memelihara kearifan lokal dan budaya, seperti tari, teater, dan kesenian lainnya;
4. Melatih orangtua dalam pengembangan usaha dan memberikan modal untuk berwirausaha;
5. Meningkatkan kapasitas Kepala Desa dalam upaya Perlindungan Anak;
6. Perlu adanya pelatihan perlindungan anak secara berkala yang memetakan isu-isu perlindungan anak yang baru;
7. Melakukan pemetaan desa-desa yang rentan terhadap kasus pelanggaran anak;
8. Di pantai Desa Kuta Mandalika ditemukan anak-anak yang berasal dari desa Kuta Mandalika dan Desa Rumbitan yang bekerja sebagai penjual souvenir dari jam 12.00 siang hingga jam 20.00 malam;
9. Adanya dorongan dan/atau pembiaran dari orang tua terhadap anak-anaknya yang bekerja sebagai penjual souvenir di pantai Kuta Mandalika;
10. Tidak adanya program-program khusus yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa Kuta Mandalika dan Desa Rumbitan dalam mencegah anak-anak untuk berjualan souvenir di pantai Kuta Mandalika; dan
11. Di Desa Kuta Mandalika telah memiliki kebijakan perlindungan anak dan juga system pencegahan melalui adanya Peraturan Desa Perlindungan Anak, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak.

Manggarai Barat

1. Perlu melakukan kajian dan inventaris upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan perlindungan anak dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Melakukan survey lapangan;
 - b. Melakukan pelatihan yang lebih mendalam kepada masyarakat, aparat desa dan pemangku kepentingan di desa;
 - c. Pembentukan kelompok-kelompok kecil yang ada di Desa untuk melakukan upaya perlindungan anak;
 - d. Mengadakan pelatihan kepada Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS);
 - e. Menyusun peraturan desa untuk sektor bisnis terkait perlindungan anak; dan
 - f. Meningkatkan pemahaman serta pembentukan desa siaga untuk perlindungan anak.
2. Belum adanya kebijakan daerah yang fokus pada perlindungan anak dari eksploitasi di Kabupaten Manggarai Barat;
3. Pemerintah kabupaten Manggarai Barat mulai menganggarkan anggaran untuk upaya perlindungan anak;
4. Terdapat alih fungsi lahan, dari pertanian dan perkebunan dijual untuk menjadi bangunan hotel/villa atau tempat-tempat wisata lainnya di kabupaten Manggarai Barat khususnya Labuan Bajo, sehingga menyebabkan adanya pergeseran mata pencaharian masyarakat dari semula petani atau pekebun menjadi nelayan atau berjualan di daerah wisata;
5. Adanya praktek eksploitasi seksual anak melalui Tindakan perdagangan anak untuk tujuan seksual di daerah labuan bajo;
6. Masih adanya fasilitas di daerah wisata yang belum aman bagi anak, misalnya daerah wisata yang belum ada lampu penerangannya, namun pihak-pihak mengelola wisata mensiasatinya dengan hanya membuak daerah wisata di siang hari;
7. Desa-desa yang terlibat dalam program ini belum memiliki Perdes terkait dengan Perlindungan anak;
8. Perlu adanya pelatihan dan pendampingan dalam memfasilitasi unsur-unsur pemangku kepentingan di desa menyusun kebijakan perlindungan anak.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelatihan Pembentukan Pariwisata Pedesaan Ramah Anak Bebas dari Kekerasan dan Eksploitasi

Latar Belakang

Pelatihan Pembentukan Pariwisata Pedesaan Ramah Anak Terbebas dari Kekerasan dan eksploitasi di 2 Kabupaten yaitu Bogor Jawa Barat dan Toba Sumatera Utara. Adapun alasan pemilihan Kabupaten Bogor menjadi daerah intervensi adalah karena Bogor sebagai daerah wisata pegunungan sekaligus daerah penyangga Ibu Kota Jakarta, memiliki potensi kunjungan wisata di setiap weekend (Sabtu-Minggu) dari warga Jakarta, tidak hanya itu, berdasarkan hasil penelitian KemenPPPA bekerjasama dengan ECPAT Indonesia terkait dengan kawin kontrak di puncak Bogor, bahwa praktek tersebut rentan terjadi juga pada anak-anak perempuan, yang sebenarnya adalah bentuk lain dari prostitusi namun dibungkus dengan perkawinan, hal ini dikarenakan banyak wisatawan yang berasal dari Timur Tengah yang datang berwisata ke wilayah Puncak, Bogor.. Hal lain yang menguatkan alasan menjadikan kabupaten Bogor sebagai kabupaten yang mendapatkan intervensi adalah hasil pemantauan media yang dilakukan oleh ECPAT Indonesia menunjukkan bahwa provinsi Jawa Barat merupakan daerah yang kasus kekerasan dan eksploitasi seksual tertinggi di Indonesia yaitu sebanyak 119 kasus. Sedangkan Kabupaten toba dipilih, karena saat ini dipilih menjadi bagian dari 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) oleh Pemerintah Presiden Jokowi, sehingga berpotensi pada peningkatan kunjungan wisata baik domestik maupun wisatawan mancanegara. Meningkatnya kunjungan wisata berpotensi meningkatkan kerentanan anak mengalami eksploitasi seksual.

Pada implementasi program pembentukan pariwisata pedesaan ramah anak bebas dari kekerasan dan eksploitasi di tahun 2023 ini mulai melibatkan Dinas terkait sebagai narasumber dan juga peserta, sehingga penyelenggara program ini tidak hanya dilakukan oleh Dinas PPPA namun juga oleh Dinas pariwisata dan PMD.



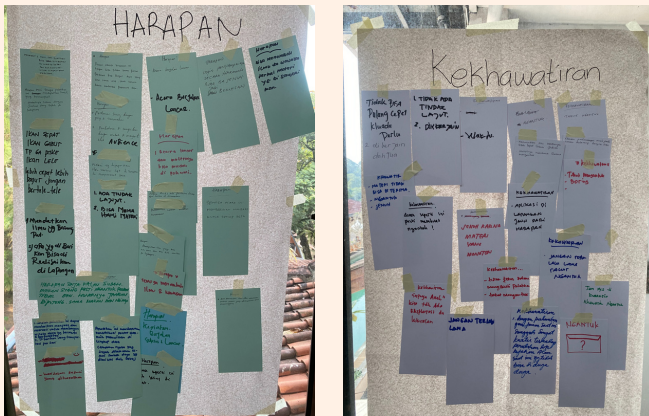
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelatihan Pembentukan Pariwisata Pedesaan Ramah Anak Bebas dari Kekerasan dan Eksploitasi

Gambaran Pelaksanaan

Kabupaten Bogor

Pelatihan Pembentukan Pariwisata Pedesaan Ramah Anak Bebas dari Kekerasan dan Eksploitasi dilaksanakan di Hotel Puri Avia Bogor dengan melatih 3 Desa, yaitu Desa Cipayung Datar, Tugu Utara dan Desa Pandan Sari pada tanggal 11-12 September 2023



Pelatihan ini diikuti oleh 50 orang peserta, yang terdiri dari perwakilan anak-anak, PKK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemerintah Desa, BPD, Babinkamtibmas, Babinsa, Pokdarwis, Karang Taruna.

Dari pelatihan yang dilakukan selama 2 hari ditemukan bahwa Desa Wisata Tugu Utara sudah membentuk dan memiliki Pokdarwis, sementara itu 2 Desa lainnya yaitu Desa Cipayung Datar dan Desa Pandan Sari belum memiliki Pokdarwis. Namun demikian ketiga Desa tersebut belum memiliki dan membentuk Forum Anak dan belum memiliki Perlindungan Anak Terpadu berbasis Masyarakat (PATBM). Selain itu ketiga Desa tersebut juga belum memiliki Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak.

Hal yang menarik dari pelaksanaan pelatihan di Kabupaten Bogor adalah bahwa selama 2 hari pelatihan tersebut, dipantau dan didampingi oleh Dinas Pariwisata dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Toba

Pelatihan Pembentukan Pariwisata Pedesaan Ramah Anak Bebas dari Kekerasan dan Eksploitasi dilaksanakan selama 2 hari yaitu pada tanggal 18-19 September 2023. Pelatihan ini diikuti oleh 3 Desa yaitu, Desa Tarabunga, Desa Lumban Silitong, Desa Sibolaho Sas. Dalam pelatihan tersebut ditemukan bahwa ketiga Desa belum memiliki dan membentuk Forum Anak dan belum memiliki Perlindungan Anak Terpadu berbasis Masyarakat (PATBM) juga belum memiliki Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak.

Sebagaimana perencanaan bahwa dalam pelatihan tersebut akan melibatkan dinas lain terkait selain Dinas PPPA yaitu dinas pariwisata dan Dinas PMD, namun dalam pelaksanaan hanya Dinas PMD yang hadir sebagai narasumber.



PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelatihan Pembentukan Pariwisata Pedesaan Ramah Anak Bebas dari Kekerasan dan Eksploitasi

Hasil Capaian Pelatihan

Analisa Potensi Desa

Pada pelatihan ini peserta diajak untuk mendiskusikan kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran terhadap hak anak, misalnya mengidentifikasi pelanggaran hak partisipasi, hak perlindungan, hak tumbuh kembang seperti Pendidikan dll. Hasilnya diharapkan peserta semakin kritis dan empaty pada saat menemukan kasus-kasus dilingkungannya sehingga tergerak untuk menyelesaikan dan mengupayakan langkah-langkah pencegahan

Peserta juga diajak untuk mengenali dan memetakan potensi, peluang desa, masalah yang terdiri dari kelemahan dan hambatan yang memicu terjadinya kerentanan anak di desa menjadi korban eksploitasi seksual di daerah wisata. Pemetaan tersebut dilakukan dengan menggunakan analisa SWOT

Adapun hasil dari analisa yang dilakukan oleh masing-masing desa adalah sebagai berikut:

Kabupaten Bogor

Desa Cipayung Datar

- Kekuatannya memiliki obyek wisata pegunungan, pendidikan masyarakat rata-rata SMA dan memiliki budaya keagamaan serta adanya kelompok-kelompok majelis taklim desa
- Kelemahannya banyaknya lokasi hiburan malam, Narkoba dan praktek prostitusi, Perkelahian.
- Tantangannya adanya pengedar dan bandar narkoba, banyak tindak kriminal, eksploitasi anak/sindikata prostitusi, pencurian dan karena obyek wisata menyebabkan jalanan jadi macet
- Peluangnya pariwisata dapat meningkatkan ekonomi masyarakat

Desa Tugu Utara

- Kekuatannya, memiliki beberapa destinasi wisata seperti air terjun, kebun the, danau dan situs budaya, obyek wisata tersebut saat ini sedang dalam perencanaan pola bisnis wisata desa dan mulai diterapkan adanya retribusi pariwisata. Kekuatannya lainnya adalah koordinasi antar Lembaga desa sudah membaik
- Kelemahannya, tidak semua masyarakat bisa menikmati dari segi ekonomi dan dengan adanya banyaknya wisatawan yang datang maka budaya asing bisa membawa pengaruh negatif pada anak-anak
- Tantangannya, susah birokrasi berupa perizinan
- Peluangnya, mengundang kesempatan untuk investor untuk membuka peluang usaha, hal ini karena desa merupakan tujuan obyek wisata dari para wisatawan

Desa Pandan Sari

- Kekuatannya, Pemahaman agama cukup tinggi karena banyaknya tokoh agama kekuatan lainnya adalah Desa memiliki kontur alam yang sangat indah (sawah dan sungai)
- Kelemahannya, tingkat Pendidikan masyarakat desa masih sangat rendah, pengangguran tinggi serta masyarakat memiliki pendapatan rendah
- Tantangannya, rentan eksploitasi seksual karena factor ekonomi dan Pendidikan yang rendah
- Peluangnya, sebagai Desa yang menjadi jalur menuju obyek wisata puncak sehingga dapat dimanfaatkan untuk menciptakan sector bisnis

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelatihan Pembentukan Pariwisata Pedesaan Ramah Anak Bebas dari Kekerasan dan Eksploitasi

Hasil Capaian Pelatihan

Kabupaten Toba

Desa Tarabunga

- Kekuatan, memiliki kawasan wisata (puncak Tara Bunga), danau toba yang indah, pertanian dan perkebunan dilengkapi dengan saluran irigasi yang cukup serta jaringan internet yang baik (ada tower)
- Kelemahannya, infrastruktur jalan kurang memadai, kurangnya tempat pembuangan sampah sehingga desa kurang bersih, sulitnya akses air bersih dan SDM masih kurang
- Tantangan, para pengunjung yang kurang etika, dan adanya oknum yang membawa narkoba ke desa, selain itu masih sering terjadi pencurian
- Peluang, adanya program dari Kementerian Pariwisata membantu pengadaan bangunan yang mendukung pariwisata Desa, selain itu ada juga program dari BUMN dan swasta yang menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk Desa

Desa Lumban Silitong

- Kekuatan, memiliki daerah pantai, Bukit Pahoda, agrowisata pertanian dan Air terjun jangguran, adanya kafe-kafe
- Kelemahan, sumber daya manusia yang rendah, banyaknya sampah, dan akses jalan yang masih minim
- Tantangan, Transportasi yaitu akses jalan yang minim, karena infrastruktur jalan tidak ada, dan keberadaan kafe-kafe mengganggu ketentraman masyarakat
- Peluang, Berpotensi mendatangkan wisatawan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengurangi pengangguran

Desa Sibolahotang Sas

- Kekuatan, memiliki atau area wisata pantai Sibolahotang yang indah, penduduk mayoritas lulusan SMA, Desa sudah membentuk dan memiliki Pokdarwis, sudah memiliki UMKM, Bumdes, serta di desa banyak memiliki fasilitas ada Homestay dan Hotel
- Kelemahan, Obyek wisata belum ditata secara maksimal, fasilitas penunjang yang masih minim, sehingga pelayanan belum maksimal, hal ini karena pengalaman dan wawasan masih kurang, kerangka pemahaman tentang tugas dan fungsi organisasi yang masih rendah karena keterbatasan kemampuan/wawasan. Kelemahan lainnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengembalikan pinjaman dari bumdes
- Tantangannya, kurangnya kesadaran dari pengunjung mengenai kebersihan, pengunjung bebas tidak ada pemantauan dari pelaku usaha, masyarakat yang mudah terpengaruh budaya pengunjung, hal ini karena masyarakat kurang mendapatkan pelatihan dan sosialisasi baik tentang hospitality maupun tentang Bumdes. Tantangan lainnya adalah pemasaran sering terhambat di status lebel halal dan berkurangnya animo pengunjung terhadap kuliner lokal
- Peluang, banyak pengunjung/wisatawan yang datang, sehingga berpeluang terciptanya lapangan kerja yang baru dan meningkatkan ekonomi dan PAD (masyarakat dan Desa)

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelatihan Pembentukan Pariwisata Pedesaan Ramah Anak Bebas dari Kekerasan dan Eksploitasi

Hasil Capaian Pelatihan

Gambaran Peserta

Pelatihan Pembentukan Pariwisata Pedesaan ramah Anak terbebas dari Kekerasan dan Eksploitasi diikuti oleh masing-masing kabupaten sebanyak 50 orang, yang terdiri dari 20 perempuan dan 30 orang laki-laki. Adapun peserta perwakilan yang hadir diantaranya berasal dari:

1. Dinas PPPA
2. Dinas PMD
3. Dinas Pariwisata
4. Forum Anak
5. Pemerintah Desa, termasuk kepala Desa dari 6 Desa
6. BPD dari 6 Desa
7. PKK
8. Karang taruna
9. Remaja
10. Anak-anak
11. Tokoh Masyarakat
12. Babinsa
13. Babinkamtibmas
14. Kepala Adat
15. Pokdarwis



Rencana Tindak Lanjut

Pada sesi akhir pelatihan ini, peserta dari 6 Desa dari kabupaten Bogor dan Kabupaten Toba menyusun rencana tindak lanjut, sebagai bentuk komitmen terhadap upaya pencegahan, penanganan dan perlindungan bagi anak dari pornografi. Adapun secara garis besar, rencana tindak lanjut dari 6 Desa adalah sebagai berikut:

- Keenam desa sepakat untuk Menyusun dan mengesahkan Perdes tentang Desa Wisata Ramah Anak
- Keenam desa berkomitmen akan membentuk Forum Anak dan PATBM
- Dua Desa yaitu Desa Tugu Utara dan Desa Sibalahotang Sas yang telah memiliki Pokdarwis sepakat untuk meningkatkan sumberdaya terkait dengan Desa wisata ramah anak, dan 4 Desa yang belum memiliki Pokdarwis akan segera membentuk Pokdarwis
- Keenam desa sepakat akan melakukan Pendidikan, sosialisasi dan kampanye terkait dengan pentingnya perlindungan anak di daerah wisata
- Kelima Desa akan berkoordinasi dan bekerjasama dengan sector swasta yang ada di Desanya dalam hal peningkatan keahlian masyarakat desa terkait bisnis pariwisata dan juga peluang mendapatkan pekerjaan yang di prioritaskan pada masyarakat di desa, sedangkan satu desa yaitu desa Tugu Utara Bogor memilih untuk memaksimalkan potensi Desanya seperti Bumdes sebelum mengundang pihak swasta untuk berinvestasi pada bisnis pariwisata di desanya dengan alasan jika di Kelola Desam aka Desa dapat melakukan control dan mengoptimalkan manfaat pariwisata bagi masyarakat desanya.

HAMBATAN, TANTANGAN – DAN PELUANG

Dalam pelaksanaan pelatihan Pembentukan Pariwisata Pedesaan ramah Anak Bebas dari Kekerasan dan Eksploitasi terdapat beberapa hambatan dan tantangan, yaitu:

- Tidak semua Dinas atau UPT dapat memanfaatkan peluang program Pariwisata Pedesaan Ramah Anak Bebas dari Kekerasan dan Eksploitasi sebagai bagian dari program strategis untuk mengembangkan desa-desa di daerah kabupatennya, hal ini terlihat dari masih adanya kabupaten yang Dinasnya tidak berkomitmen hadir dan mendampingi desa-desa yang sedang mengikuti pelatihan
- Keaktifan Dinas pariwisata dan Dinas PMD serta Pokdarwis kabupaten selama pelatihan, yaitu memberikan pendampingan dan arahan bagi Desa mampu menumbuhkan semangat dan arah bagi desa dalam mewujudkan pembangunan pariwisata ramah anak di desanya. Praktek baik ini sekaligus memberikan harapan dan peluang bahwa koordinasi dan Kerjasama antar Dinas terkait dalam program ini berpeluang untuk dilakukan.
- Keenam Desa yang dilatih sebelumnya belum pernah mendapatkan pelatihan dan sosialisasi terkait dengan hak anak, atau program-program terkait dengan perlindungan anak, sehingga proses pelatihan masih membutuhkan pendalaman materi terkait dengan hak anak
- Terdapat 2 Desa di kabupaten Bogor yaitu Desa Cipayung Datar dan Desa Pandan Sari yang belum menjadi Desa Wisata, sehingga pada program kedepan perlu dilakukan verifikasi atau background check bagi desa yang akan mendapatkan pelatihan

REKOMENDASI

- Penting adanya pertemuan khusus pendahuluan yang melibatkan dinas-dinas terkait atau UPT yaitu Dinas PPPA, Dinas pariwisata dan Dinas PMD terkait dengan penting dan mendesaknya dilaksanakan program pembentukan pariwisata pedesaan ramah anak bebas dari kekerasan dan eksploitasi
- Adanya program lanjutan, pendalaman hak anak bagi pemerintah Desa dan stakeholder desa terkait
- Adanya program lanjutan yang khusus bagi anak-anak di Desa terkait dengan pelatihan tentang peningkatan pengetahuan dan keahlian anak-anak dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran anggaran Desa

Pelatihan Pembentukan Pariwisata Pedesaan Ramah Anak di Kabupaten Bogor

Lampiran

Tabel 1: Hasil Analisa SWOT Desa Pandan Sari

Kekuatan	Kelemahan	Tantangan	Peluang
- Pemahaman agama cukup tinggi karena banyaknya tokoh agama - Desa memiliki kontur alam yang sangat indah (sawah dan sungai)	- Tingkat Pendidikan sangat rendah - Pengangguran tinggi - Pendapatan rendah	Rentan eksploitasi seksual karena factor ekonomi dan Pendidikan yang rendah	- Jalur wisata yang dilalui menuju obyek wisata puncak - Menciptakan sector bisnis dengan memanfaatkan jalur atau jalan menuju puncak

Tabel 2: Hasil Analisa SWOT Desa Cipayung Datar

Kekuatan	Kelemahan	Tantangan	Peluang
- Masih ada pesantren - Majelis taklim - Budaya keagamaan - Wisata - Ekonomi bagus - Pendidikan rata-rata SMA	- Banyaknya lokasi hiburan malam - Narkoba - Prostitusi - Perkelahian	- Pengedar dan bandar narkoba - Banyak tindak criminal - Eksplkoitasi anak/sindikast prostitusi - Pencurian - Jalanan jadi macet	Meningkatkan ekonomi masyarakat

Tabel 3: Hasil Analisa SWOT Desa Tugu Utara

Kekuatan	Kelemahan	Tantangan	Peluang
- Destinasi wisata seperti air terjun, kebun teh, danau dan situs budaya - Dalam perencanaan pola bisnis wisata desa - Retribusi pariwisata - Koordinasi antar Lembaga desa sudah membaik	- Tidak semua masyarakat bisa menikmati dari segi ekonomi - Budaya asing bisa membawa pengaruh negative pada anak-anak	Susahnya birokrasi berupa perizinan	- Mengundang kesempatan untuk investor untuk membuka peluang usaha - Tujuan obyek wisata wisatawan

Pelatihan Pembentukan Pariwisata Pedesaan Ramah Anak di Kabupaten Bogor

Lampiran

Tabel 4: Rencana Tindak Lanjut (RTL) Desa Pandan Sari

Kebijakan

Kriteria	Indikator	Bukti Pendukung
Peraturan Terkait Desa Wisata Ramah Anak Bebas dari Kekerasan dan Eksploitasi	Pemerintah Desa bekerjasama dengan Masyarakat terlibat dalam Menyusun Perdes	Adanya Perdes Desa Wisata

SDM

Kriteria	Indikator	Bukti Pendukung
Peningkatan SDM terkait Kekerasan Seksual dan Eksploitasi pada Anak dan Peningkatan terkait Desa Wisata	Adanya pelatihan SDM terkait desa wisata ramah anak	Adanya dokumentasi kegiatan

Data

Kriteria	Indikator	Bukti Pendukung
Menyediakan fasilitas untuk anak	Keterlibatan pemerintah desa dan Masyarakat untuk mendukung pengadaan fasilitas untuk anak	- Adanya dokumentasi kegiatan - Lokasi kegiatan

Fasilitas

Kriteria	Indikator	Bukti Pendukung
- Pembuatan Fasilitas Permainan ATV - Informasi Wisata Desa	- Lokasi permainan - Alat permainan (ATV, helm, dll) - Sosial Media - Video	- Dokumentasi - Sosial Media

Pelaku Bisnis

Kriteria	Indikator	Bukti Pendukung
- UMKM - Pengelola Wisata	- Kios UMKM - Lokasi UMKM - Staf/Pemilik - SOP Wisata Ramah Anak	- Dokumentasi - Sosial Media

Pelatihan Pembentukan Pariwisata Pedesaan Ramah Anak di Kabupaten Bogor

Lampiran

Tabel 5: Rencana Tindak Lanjut (RTL) Desa Cipayung Datar

Kebijakan

Kriteria	Indikator	Bukti Pendukung
Peraturan Desa Wisata	Masyarakat dan Pemerintah Desa terlibat dalam penyusunan Perdes	Adanya Perdes Desa Wisata

SDM

Kriteria	Indikator	Bukti Pendukung
Peningkatan SDM terkait Peningkatan Wisata	• Pengetahuan dan Pemahaman • Adanya SOP Wisata Desa, AD, ART serta adanya pelatihan penggunaan SDM	• Adanya SOP, AD ART • Sokumentasi kegiatan pembinaan

Data

Kriteria	Indikator	Bukti Pendukung
Fasilitas Pembelajaran Perpustakaan Potensi Wisata	Keterlibatan pemerintah Desa dan Masyarakat untuk ikut mendukung	• Dokumentasi • Lakasi kegiatan

Fasilitas

Kriteria	Indikator	Bukti Pendukung
Masih direncanakan camping ground	Tempat camping	Lokasi kegiatan

Pelaku Bisnis

Kriteria	Indikator	Bukti Pendukung
Pengelola wisata	Arena bermain	Data dan dokumentasi kegiatan

Pelatihan Pembentukan Pariwisata Pedesaan Ramah Anak di Kabupaten Bogor

Lampiran

**Tabel 6: Rencana Tindak Lanjut (RTL) Desa Tugu Utara
Kebijakan**

Kriteria	Indikator	Bukti Pendukung
Peraturan Desa, Desa wisata dewi amarta	Masyarakat dan Pemerintah Desa terlibat dalam penyusunan Perdes	Karena sudah ada Perdes Desa wisata kami akan menambahkan poin-poin wisata ramah anak

SDM

Kriteria	Indikator	Bukti Pendukung
Untuk meningkatkan adanya partisipasi anak dan SDM dibidang pelayanan dan pengolahan wisata ramah anak	- Membuat SOP disetiap pelaku usaha wisata tentang perlindungan anak - Membuat jadwal Pelatihan & Bimtek SDM terkait wisata Ramah Anak	- Adanya dokumentasi kegiatan - Jumlah peserta anak yang mengikuti bimtek - Daftar hadir peserta (anak) dan narasumber

Data

Kriteria	Indikator	Bukti Pendukung
- Menyediakan tempat pembelajaran untuk anak - Menyediakan perpustakaan	Dalam proses belajar mengajar dapat Melibatkan Pemerintahan Desa dan Masyarakat	- Dokumentasi - Data jumlah anak

Fasilitas

Kriteria	Indikator	Bukti Pendukung
Tourisme informasi	- Video - Kode etik - Brosur	Media sosial

Pelaku Bisnis

Kriteria	Indikator	Bukti Pendukung
- UMKM - Homestay - Fotografer - Offroad	- Warung UMKM - Kamar tidur - Toilet - Staff atau pemilik - SOP Wisata - Kamera - Kendaraan offroad	- Data - Foto fasilitas kegiatan - Media sosial

Pelatihan Pembentukan Pariwisata Pedesaan Ramah Anak di Kabupaten Toba

— Lampiran

Tabel 7: Hasil Analisa SWOT Desa Tara Bunga

Kekuatan	Kelemahan	Tantangan	Peluang
- Memiliki Kawasan wisata (puncak Tara Bunga) - Memiliki Pertanian dan perkebunan - Memiliki saluran irigasi yang cukup - Memiliki jaringan internet yang baik (ada tower) - Memiliki danau toba yang indah dan juga menjadi mata pencaharian penduduk	- Infrastruktur jalan kurang memadai - Kurangnya tempat pembuangan sampah - Akses air bersih kurang - SDM yang kurang - Kurangnya kebersihan	- Para pengunjung yang kurang etika - Adanya oknum yang membawa narkoba ke desa - Sering terjadi pencurian	- Program Kemenpar membantu pengadaan bangunan yang mendukung pariwisata Desa - Program pihak BUMN dan swasta yang menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk Desa

Tabel 8: hasil Analisa SWOT Desa Lumban Sihotang

Dusun	Kekuatan	Kelemahan	Tantangan	Peluang
Dusun I	Lokasi pantai	- SDM rendah - Banyak sampah	Transportasi	- Berkurangnya pengangguran - Meningkatnya perekonomian masyarakat
Dusun II	Lokasi Bukit Pahoda	- Akses lahan - SDM	- Transportasi - Infrastruktur jalan tidak ada	- Bertumbuhnya ekonomi masyarakat - Berpotensi mendatangkan wisatawan
Dusun III	Agrowisata (pertanian)	Akses jalan	- Transportasi - Akses jalan belum memadai	Meningkatnya perekonomian masyarakat
Dusun IV	- Lokasi pantai - Air terjun jangguran - Agrowisata	- Akses jalan - SDM yang rendah	Mengganggu ketentraman masyarakat	- Berkurangnya pengangguran - Meningkatnya perekonomian masyarakat

Pelatihan Pembentukan Pariwisata Pedesaan Ramah Anak di Kabupaten Toba

— Lampiran

Tabel 9: hasil Analisa SWOT Desa Sibolahotang Sas

Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
- Pantai Sibolahotang yang indah - Penduduk mayoritas lulusan SMA - Memiliki Pokdarwis - UMKM - Bumdes - Fasilitas ada Homestay dan Hotel	- Penataan yang belum maksimal - Pengalaman dan wawasan masih kurang - Kerangka pemahaman tentang tugas dan fungsi organisasi - Keterbatasan kemampuan/wawasan - Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengembalikan pinjaman - Fasilitas penunjang masih minim - Pelayanan yang kurang maksimal	- Banyak pengunjung/ wisatawan yang datang - Terciptanya lapangan kerja yang baru - Meningkatkan ekonomi dan PAD (masyarakat dan Desa) - Meningkatkan pendapatan kelompok dan pribadi - Membantu usaha/modal pelaku usaha wisata - Menambah pendampatan/ekonomi - Terciptanya lapangan kerja baru - Peningkatan perekonomian - Menambah lapangan kerja baru	- Kurangnya kesadaran dari pengunjung mengenai kebersihan - Mudah terpengaruh budaya pengunjung - Kurangnya pelatihan dan sosialisasi - Pemasaran sering terhambat di status lebel halal - Kurangnya pelatihan dan sosialisasi pada pengurus Bumdes - Bebasnya tamu yang berkunjung lepas dari pantauan pelaku usaha - Seiring waktu tenaga kerja beralih dari masyarakat desa ke tenaga dari luar desa - Produk local (berkurangnya animo pengunjung terhadap kuliner local)

Pelatihan Pembentukan Pariwisata Pedesaan Ramah Anak di Kabupaten Toba

— Lampiran

Tabel 10: Rencana Tindak Lanjut (RTL) Desa Tara Bunga

Indikator	Bentuk Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
Kebijakan	- SK PATBM - SK Forum Anak	Bulan November 2023
SDM	- Peningkatan kapasitas sadar wisata melalui sosialisasi pad saat Musyawarah desa - Latihan untuk anak sanggar (seni local)	- Bulan November 2023 - Seminggu 2 kali
KIE	- Mempromosikan Ikewat media social (FB, IG dan YouTube) - Mengkampanyekan Stop kekerasan terhadap anak di Desa Tarabunga	- Bulan November – Desember 2023 - Bulan Oktober 2023

Tabel 11: Rencana Tindak Lanjut (RTL) Desa Lumban Sihotang

Indikator	Bentuk Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
• Kebijakan	• Musyawarah untuk menetapkan Perdes	Januari 2024
• SDM	- Melestarikan Tenun ulos - Menambah pengetahuan tentang pembentukan wisata pedesaan ramah anak	Oktober 2024
• Pelaku Bisnis	• Melakukan pendataan kepada pengusaha wisata/café dan resto	Oktober 2024
• KIE	• Mempromosikan melalui sosmed	Oktober 2024

Tabel 12: Rencana Tindak Lanjut (RTL) Desa Sibolahotang Sas

Indikator	Bentuk Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
• Kebijakan	• Musyawarah untuk menetapkan Perdes	Januari 2024
• SDM	- Melestarikan Tenun ulos - Menambah pengetahuan tentang pembentukan wisata pedesaan ramah anak	Oktober 2024
• Pelaku Bisnis	• Melakukan pendataan kepada pengusaha wisata/café dan resto	Oktober 2024
• KIE	• Mempromosikan melalui sosmed	Oktober 2024

SECRETARIAT OF ECPAT INDONESIA



Jl. Angsana 1 No.16, RT.10/RW.5, Pejaten Timur,
Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12510

 (021) 25034840 / 0811-9771-775

 secretariat@ecpatindonesia.org

 ECPAT_Indonesia

 @ECPAT_Indonesia

 ECPAT Indonesia